



Original Article

Manajemen dan Tata Kelola Perpustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Student-Centered Governance

Moch Fikriansyah Wicaksono✉

Universitas Brawijaya

fikriansyah@ub.ac.id✉

Abstract

This article examines how library management and governance can be strengthened in higher education institutions through the systematic adoption of international standards and national regulations. The study addresses the problem of fragmented governance practices, unclear accountability, and uneven performance measurement that limit service quality and user engagement. Data were collected through an integrative review of authoritative standards and frameworks, complemented by documentary analysis of Indonesian regulations for academic libraries. The analysis employed a thematic synthesis and framework analysis to map findings onto core governance dimensions: strategic direction, organizational structure, decision-making processes, accountability and transparency, performance indicators, impact assessment, and stakeholder participation. The results articulate a practical governance model that aligns management processes with performance and impact measurement, clarifies roles and responsibilities, and embeds student participation in policy and service design. The model specifies measurable performance indicators, recommends procedures for assessing library impact on learning and research, and identifies common implementation challenges, including resource constraints and resistance to change, alongside feasible mitigation strategies. The study concludes that a standards-aligned governance architecture improves accountability, evidences value, and supports continuous improvement. It offers actionable guidance for library leaders to integrate management routines with governance mechanisms and to institutionalize evidence-based decision making in academic libraries.



[https://jurnal.usk.ac
.id/riwayat](https://jurnal.usk.ac.id/riwayat)

Keywords: library governance; performance indicators; university libraries.

Pendahuluan

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam menunjang kegiatan akademik mahasiswa, dosen, dan peneliti. Namun, dalam era pendidikan tinggi yang semakin kompetitif, orientasi pengelolaan perpustakaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada efisiensi manajemen internal, melainkan juga pada tata kelola yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama. Isu mengenai manajemen dan tata kelola perpustakaan berbasis student-centered governance muncul sebagai respon atas tuntutan bahwa mahasiswa perlu dilibatkan tidak hanya sebagai pengguna pasif, melainkan juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan layanan informasi.

Secara akademik, fenomena ini penting karena mencerminkan pergeseran paradigma dari library-centered menuju student-centered governance, di mana partisipasi mahasiswa dipandang sebagai faktor kunci dalam memastikan layanan perpustakaan relevan, adaptif, dan berkelanjutan. [Atkinson \(2016\)](#) dan [Mandrekar \(2021\)](#) menunjukkan bahwa inovasi layanan perpustakaan digital yang melibatkan mahasiswa dapat meningkatkan keterhubungan antara perpustakaan dan ekosistem kampus. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dapat mempercepat transformasi layanan berbasis kebutuhan riil pengguna.

Lebih jauh, pendekatan ini memiliki signifikansi strategis dalam konteks tata kelola pendidikan tinggi secara keseluruhan. Menurut [Jamawadi, \(2025\)](#), tata kelola partisipatif yang memberi ruang bagi mahasiswa dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas institusi, tetapi juga memperkuat posisi mahasiswa sebagai stakeholder utama. Dengan demikian, mengkaji manajemen dan tata kelola perpustakaan berbasis student-centered governance menjadi krusial baik untuk literatur akademik maupun untuk praktik pengelolaan perpustakaan di perguruan tinggi.

Literatur yang membahas manajemen dan tata kelola perpustakaan berbasis student-centered governance dapat dipetakan ke dalam dua fokus utama. Pertama, kajian yang menyoroti aspek layanan perpustakaan yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa, seperti yang diungkap [Atkinson \(2016\)](#) dan [Mandrekar \(2021\)](#) mengenai pentingnya inovasi layanan digital berbasis mobile yang dikembangkan bersama mahasiswa. Kedua, kajian yang lebih menekankan pada peran mahasiswa dalam tata kelola pendidikan tinggi secara lebih luas, seperti ditunjukkan oleh [Jamawadi \(2025\)](#), yang menguraikan bagaimana partisipasi mahasiswa dalam governance berdampak pada kualitas pengambilan keputusan institusi.

Namun, sebagian besar literatur tersebut masih cenderung menekankan salah satu sisi saja: antara layanan manajerial atau aspek governance yang bersifat normatif. Belum banyak penelitian yang secara kritis mengintegrasikan keduanya, yakni bagaimana praktik manajemen perpustakaan dapat berjalan seiring dengan prinsip tata kelola partisipatif berbasis mahasiswa. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang menekankan integrasi antara manajemen operasional perpustakaan dan tata kelola strategis agar model student-centered governance dapat benar-benar dioperasionalisasikan.

Permasalahan utama yang muncul adalah masih terbatasnya model konseptual dan implementasi praktis yang mengintegrasikan manajemen perpustakaan dengan tata kelola berbasis student-centered governance. Padahal, keberhasilan perpustakaan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan digitalisasi, relevansi layanan, dan akuntabilitas publik sangat ditentukan oleh sejauh mana mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi layanan. Dari permasalahan tersebut dapat diturunkan dua

pertanyaan penelitian penting yaitu Pertama adalah bagaimana praktik manajemen perpustakaan perguruan tinggi dapat diadaptasi untuk mendukung penerapan tata kelola berbasis student-centered governance, dan kedua bagaimana model integrasi seperti apa yang paling sesuai untuk memastikan partisipasi mahasiswa berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan tata kelola perpustakaan.

Perlunya pengujian keabsahan manajemen dan tata kelola perpustakaan berbasis student-centered governance didasari pada fakta bahwa meskipun konsep ini telah banyak didiskusikan dalam literatur pendidikan tinggi, penerapannya di ranah perpustakaan perguruan tinggi masih sangat terbatas. Banyak institusi yang mengklaim menerapkan pendekatan student-centered, namun masih cenderung menempatkan mahasiswa sebagai objek layanan, bukan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan dan inovasi layanan perpustakaan.

Dengan menguji keabsahan model ini, penelitian dapat memberikan kontribusi penting untuk memperjelas sejauh mana pendekatan student-centered governance dapat diterapkan secara nyata dalam konteks manajemen perpustakaan. Argumen ini juga memungkinkan adanya rekomendasi praktis bagi perpustakaan perguruan tinggi agar tidak hanya mengadopsi jargon partisipasi, melainkan benar-benar merumuskan strategi manajerial dan tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur integratif (integrative literature review). Metode ini dipilih karena isu manajemen dan tata kelola perpustakaan berbasis student-centered governance masih relatif baru, sehingga dibutuhkan sintesis komprehensif dari berbagai literatur untuk memahami konsep, kecenderungan, serta celah penelitian yang ada. Tinjauan integratif memungkinkan peneliti menggabungkan literatur teoretis maupun empiris dengan berbagai pendekatan metodologis untuk menghasilkan perspektif baru ([Whittemore & Knafl, 2005](#)).

Literatur dikumpulkan dari basis data internasional dan nasional, seperti Scopus, Web of Science, ProQuest, SpringerLink, dan Garuda, serta dokumen kebijakan organisasi profesi seperti IFLA. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data bibliografi dalam format RIS dari hasil penelusuran awal di Scopus yang relevan dengan topik penelitian. Kata kunci yang digunakan meliputi: library management, library governance, student-centered governance, academic libraries, dan higher education libraries.

Literatur yang dimasukkan adalah artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang terbit dalam kurun waktu 2005–2025, berbahasa Inggris maupun Indonesia, serta relevan dengan topik manajemen, tata kelola perpustakaan, dan partisipasi mahasiswa. Literatur yang bersifat opini tanpa dasar akademik, duplikat, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tema ditinggalkan.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) pengumpulan data literatur, (2) seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, (3) ekstraksi data berupa konsep utama, metode, dan temuan penelitian, (4) pengelompokan tema yang relevan dengan topik penelitian, dan (5) sintesis integratif yang menghubungkan antara teori manajemen, tata kelola perpustakaan, dan student-centered governance. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan tren penelitian, menemukan gap konseptual, serta membangun kerangka konseptual baru.

Untuk menjaga keabsahan hasil tinjauan, penelitian ini menerapkan prinsip transparansi dan replikasi dalam pemilihan literatur. Setiap artikel yang dipilih dicatat dalam tabel bibliografi lengkap dengan sumber, tahun terbit, metode, dan temuan utama. Selain itu, dilakukan triangulasi literatur dengan membandingkan hasil dari berbagai basis data agar cakupan lebih komprehensif.

Hasil Penelitian

1. Adaptasi Praktik Manajemen Perpustakaan untuk Mendukung Penerapan Student-Centered Governance

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa paradigma manajemen perpustakaan perguruan tinggi telah mengalami pergeseran signifikan dalam dua dekade terakhir. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai unit administratif yang berfungsi menyimpan dan menyediakan koleksi, tetapi sebagai ekosistem pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif. [Wilson dan McCarthy \(2010\)](#) menunjukkan bahwa manajemen perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan pola kebutuhan mahasiswa akan meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memperkuat fungsi sosial perpustakaan dalam mendukung proses pembelajaran di universitas. Perubahan orientasi ini menuntut adanya strategi manajerial yang menempatkan mahasiswa bukan sekadar pengguna akhir, tetapi sebagai co-creator layanan informasi.

Prinsip student-centered governance mensyaratkan perpustakaan mengadopsi sistem manajemen yang terbuka terhadap partisipasi mahasiswa. Salah satu bentuk adaptasi yang banyak ditemukan dalam literatur adalah penerapan pendekatan co-design dalam pengembangan layanan. Melalui survei, forum diskusi, atau program duta perpustakaan, mahasiswa dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan. Studi [Wilson dan McCarthy \(2010\)](#) di Ryerson University, misalnya, menunjukkan bagaimana mahasiswa berperan penting dalam menguji dan menyesuaikan desain layanan mobile library. Dengan pendekatan ini, keputusan manajerial tidak hanya bersumber dari tim internal pustakawan, tetapi juga didasarkan pada aspirasi nyata pengguna.

Selain partisipasi dalam perencanaan, adaptasi manajemen juga tampak dalam pola pengelolaan sumber daya manusia di perpustakaan. [Petrušić \(2023\)](#) menjelaskan bahwa model manajemen berbasis learning organization menjadikan pustakawan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sekadar pelaksana administrasi. Pustakawan dituntut mengembangkan kompetensi komunikasi, literasi digital, dan kemampuan membangun kemitraan dengan mahasiswa. Dengan kata lain, efektivitas manajemen perpustakaan di era student-centered governance tidak hanya diukur dari efisiensi operasional, tetapi juga dari sejauh mana pustakawan mampu berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai mitra dalam pengelolaan informasi.

Namun, literatur juga menyoroti sejumlah tantangan dalam mengadaptasi praktik manajemen ke arah yang lebih partisipatif. [Jamawadi \(2025\)](#) mencatat bahwa banyak lembaga pendidikan tinggi yang masih mempraktikkan sistem manajemen top-down, di mana kebijakan ditentukan oleh otoritas administratif tanpa mekanisme konsultasi pengguna. Dalam konteks perpustakaan, hal ini menyebabkan mahasiswa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan preferensi terkait koleksi, ruang belajar, atau program literasi. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya perubahan budaya organisasi agar manajemen perpustakaan lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan mahasiswa.

Selain faktor budaya organisasi, infrastruktur digital juga menjadi prasyarat penting bagi adaptasi manajemen perpustakaan berbasis student-centered governance. [Vettriselman et al. \(2024\)](#) menekankan bahwa adopsi sistem digital dan data-driven management dapat

memperkuat keterlibatan pengguna dengan memberikan ruang untuk umpan balik real-time dan analisis perilaku pengguna. Sistem ini memungkinkan perpustakaan mengidentifikasi tren kebutuhan informasi mahasiswa, memperkirakan permintaan koleksi, serta menilai kepuasan pengguna secara berkelanjutan. Oleh karena itu, digitalisasi bukan hanya inovasi teknologi, tetapi strategi manajerial yang mendukung transparansi dan partisipasi.

Secara keseluruhan, hasil tinjauan ini menegaskan bahwa praktik manajemen perpustakaan yang mendukung student-centered governance memiliki tiga ciri utama: partisipasi pengguna dalam pengambilan keputusan, transformasi peran pustakawan sebagai fasilitator pembelajaran, dan penggunaan teknologi sebagai enabler partisipasi. Ketiganya membentuk model manajemen yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kolaborasi antara pustakawan dan mahasiswa. Model inilah yang memungkinkan perpustakaan perguruan tinggi menjadi organisasi pembelajaran yang hidup, relevan, dan berkelanjutan.

2. Model Integrasi Manajemen dan Tata Kelola dalam Kerangka Student-Centered Governance

Sintesis literatur mengindikasikan bahwa integrasi antara manajemen dan tata kelola perpustakaan dalam kerangka student-centered governance merupakan upaya untuk menyatukan dua domain yang selama ini berjalan paralel: efisiensi operasional dan legitimasi partisipatif. [Minksová dan Pabian \(2011\)](#) menegaskan bahwa tata kelola partisipatif hanya akan efektif bila diikuti oleh struktur manajemen yang terbuka terhadap aspirasi pengguna. Dalam konteks perpustakaan, hal ini berarti bahwa keputusan strategis tentang layanan, anggaran, dan pengembangan sumber daya informasi harus mempertimbangkan suara mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.

Model integrasi yang paling banyak dibahas dalam literatur adalah model tata kelola partisipatif kolaboratif (collaborative participatory governance model). Model ini menekankan kemitraan antara pustakawan, mahasiswa, dan pihak universitas dalam setiap tahap manajemen perpustakaan. [Wilson dan McCarthy \(2010\)](#) menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas unit di Ryerson University dalam proyek mobile campus library tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas partisipasi mahasiswa dalam desain kebijakan digital kampus. Dalam kerangka ini, tata kelola dan manajemen dipandang bukan sebagai dua entitas terpisah, melainkan sistem yang saling memperkuat dalam mencapai tujuan akademik universitas.

Secara struktural, model integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Library Student Advisory Council atau forum konsultatif mahasiswa yang secara reguler dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme tersebut, mahasiswa berperan aktif dalam merumuskan prioritas layanan, mengevaluasi kinerja perpustakaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan. [Petrušić \(2023\)](#) menekankan bahwa bentuk partisipasi semacam ini dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen, karena kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan aktual pengguna. Selain itu, keterlibatan mahasiswa juga mendorong peningkatan literasi informasi dan kepemimpinan mereka sebagai bagian dari pembelajaran nonformal di kampus.

Dari sisi manajerial, integrasi ini membutuhkan penerapan prinsip shared leadership di mana pustakawan berperan sebagai koordinator dan fasilitator, bukan pengambil keputusan tunggal. Model ini memungkinkan desentralisasi kewenangan, memperkuat komunikasi dua arah, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. [Jamawadi \(2025\)](#) menyebut model ini sebagai pro-student governance, yaitu bentuk tata kelola yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan mahasiswa tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional pustakawan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial perpustakaan di mata sivitas akademika.

Hasil tinjauan juga menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi manajemen dan tata kelola tidak terlepas dari faktor etika dan keadilan dalam distribusi kekuasaan. Menurut Minksová dan Pabian (2011), partisipasi mahasiswa sering kali bersifat simbolis jika tidak diikuti oleh redistribusi otoritas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu menciptakan mekanisme formal yang menjamin mahasiswa memiliki suara yang setara dalam forum kebijakan, misalnya melalui keanggotaan dalam dewan perpustakaan universitas atau komite evaluasi layanan. Pendekatan ini memungkinkan student-centered governance terwujud secara substantif, bukan sekadar retorik.

Secara konseptual, integrasi antara manajemen dan tata kelola berbasis student-centered governance menghasilkan perpustakaan yang efisien secara operasional, legitim secara sosial, dan berkelanjutan secara institusional. Perpustakaan tidak hanya menjadi pengelola informasi, tetapi juga mediator antara kepentingan akademik dan kebutuhan mahasiswa. Dengan kata lain, perpustakaan berfungsi sebagai platform kolaboratif di mana kebijakan, inovasi layanan, dan strategi pembelajaran dirancang bersama. Model integratif ini menjadi alternatif baru dalam pengelolaan lembaga informasi di era pendidikan tinggi yang semakin berorientasi pada partisipasi dan kolaborasi pengguna.

Pembahasan

Model Konseptual: Integrasi Manajemen dan Tata Kelola Perpustakaan Berbasis Student-Centered Governance

Model ini menggambarkan bahwa keberhasilan penerapan student-centered governance di perpustakaan perguruan tinggi ditentukan oleh sinergi dua dimensi utama: (1) Manajemen Perpustakaan Adaptif dan (2) Tata Kelola Partisipatif Kolaboratif. Pada dimensi pertama, manajemen adaptif mencakup tiga elemen kunci:

- Responsivitas terhadap kebutuhan mahasiswa (perencanaan berbasis data pengguna),
- Kolaborasi pustakawan–mahasiswa dalam inovasi layanan, dan
- Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana partisipasi dan transparansi.

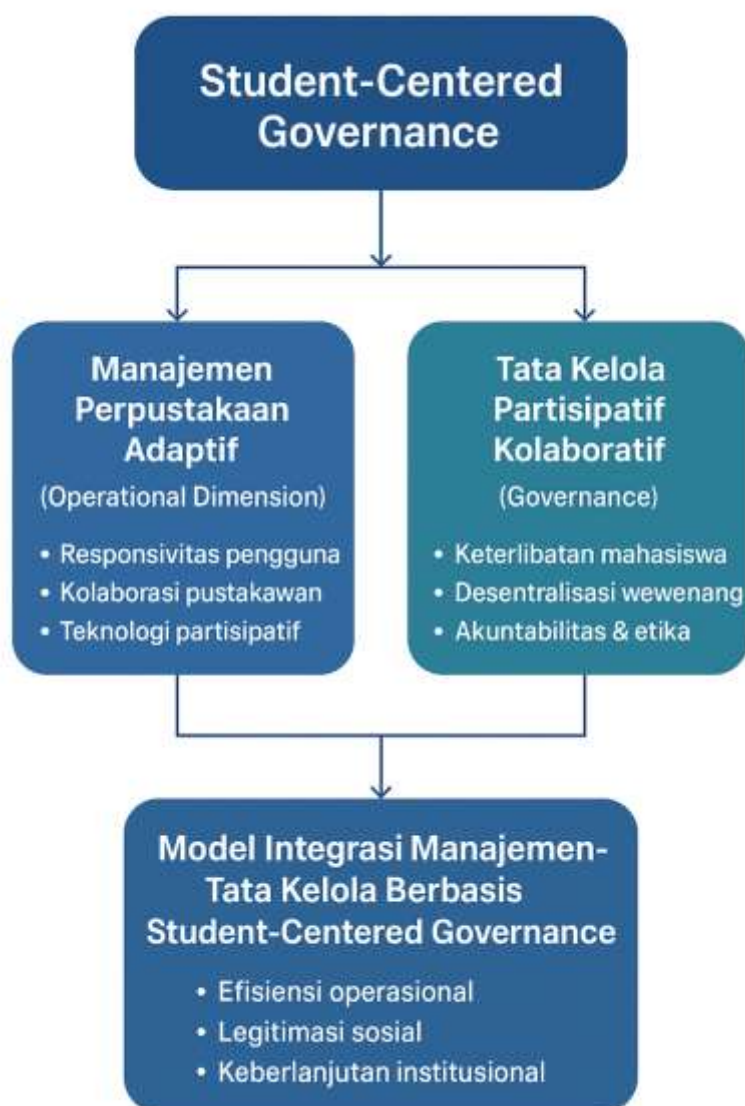
Sementara pada dimensi kedua, *tata kelola partisipatif kolaboratif* mencakup:

- Keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan,
- Desentralisasi kewenangan pustakawan, dan
- Akuntabilitas serta keadilan dalam kebijakan perpustakaan.

Kedua dimensi ini berinteraksi secara timbal balik dan saling memperkuat. Sinergi tersebut menghasilkan model integrasi manajemen–tata kelola, yang berdampak pada tiga keluaran utama (outcome):

1. Efisiensi operasional,
2. Legitimasi sosial, dan
3. Keberlanjutan institusional perpustakaan perguruan tinggi.

Model ini juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak lagi berada pada posisi “pengguna” (user) semata, melainkan menjadi “mitra pengelola” (co-manager) dalam menciptakan layanan informasi yang inklusif, adaptif, dan relevan.



Interpretasi Akademik

- Arah atas-bawah (vertical) menggambarkan hubungan konseptual dari paradigma (student-centered governance) menuju operasional (manajemen adaptif) dan struktural (tata kelola partisipatif).
- Arah horizontal (kiri–kanan) menunjukkan hubungan saling melengkapi antara manajemen (efisiensi internal) dan tata kelola (legitimasi eksternal).
- Outcome di bagian bawah memperlihatkan hasil akhir yang diharapkan: perpustakaan yang efisien, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil tinjauan literatur integratif ini menegaskan bahwa transformasi manajemen dan tata kelola perpustakaan perguruan tinggi menuju paradigma student-centered governance merupakan kebutuhan strategis di era pendidikan tinggi modern. Pergeseran ini menuntut

perpustakaan untuk tidak lagi berorientasi pada efisiensi internal semata, tetapi juga pada partisipasi aktif mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan dan inovasi layanan. Dengan demikian, perpustakaan berperan tidak hanya sebagai lembaga penyedia informasi, tetapi juga sebagai ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dua dimensi utama—manajemen perpustakaan adaptif dan tata kelola partisipatif kolaboratif—merupakan inti dari implementasi student-centered governance. Dimensi pertama menekankan kemampuan manajemen dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa melalui responsivitas layanan, kolaborasi pustakawan–pengguna, serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara dimensi kedua menggarisbawahi pentingnya partisipasi substantif mahasiswa, desentralisasi kewenangan, serta akuntabilitas kebijakan sebagai wujud transparansi tata kelola. Sinergi antara keduanya melahirkan model perpustakaan yang efisien secara operasional, legitim secara sosial, dan berkelanjutan secara institusional.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi, terutama dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip governance dapat diadaptasi ke dalam konteks lembaga informasi. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah literatur dengan memperkenalkan konsep integratif yang menggabungkan manajemen modern dan tata kelola partisipatif dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi pedoman bagi pengelola perpustakaan perguruan tinggi dalam merancang kebijakan dan strategi layanan yang lebih inklusif serta berbasis kemitraan dengan mahasiswa.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, seperti pembentukan Library Student Advisory Council, penguatan forum konsultatif antara pustakawan dan mahasiswa, penerapan sistem umpan balik digital, serta pemberdayaan mahasiswa sebagai library ambassador dalam kegiatan literasi informasi. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat posisi perpustakaan sebagai pusat kolaborasi akademik dan sosial di lingkungan universitas.

Meskipun demikian, tinjauan ini juga menemukan bahwa sebagian besar praktik student-centered governance di perpustakaan masih berada pada tataran deklaratif dan belum sepenuhnya dioperasionalisasikan dalam sistem manajemen yang konkret. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji keefektifan model integratif ini secara empiris pada berbagai tipe perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pendekatan kuantitatif melalui survei kepuasan pengguna atau analisis kinerja organisasi, serta pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan wawancara mendalam, dapat memberikan bukti nyata mengenai sejauh mana prinsip student-centered governance dapat meningkatkan kinerja manajemen dan tata kelola perpustakaan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perpustakaan perguruan tinggi untuk menata ulang paradigma pengelolaannya. Student-centered governance bukan sekadar slogan partisipatif, tetapi strategi institusional yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam pembangunan budaya akademik yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Daftar Pustaka

ACRL. (2018). *Standards for Libraries in Higher Education*. Association of College &

- Research Libraries. <https://www.ala.org/acrl/standards>
- ACRL. (2022). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Association of College & Research Libraries. <https://www.ala.org/acrl/standards>
- Atkinson, J. (2016). Academic libraries and student support: An overview. In *Quality and the Academic Library: Reviewing, Assessing and Enhancing Service Provision* (pp. 93–100). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802105-7.00009-9>
- Bird, A. (2014). Modeling ACRL's *Standards for Libraries in Higher Education*. *C&RL News*, 75(8). <https://crln.acrl.org/>
- Byrne, A. (2022). A declaration for all seasons: The IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom. *IFLA Journal*, 48(3), 373–382. <https://doi.org/10.1177/03400352221106801>
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2017). *IFLA Library Reference Model: A Conceptual Model for Bibliographic Information*.
- IFLA. (2018). *Libraries and Good Governance—Brief*.
- IFLA. (2021). *IFLA Governance—Overview of structures in force following IFLA GA August 2021*.
- ISO. (2014). *ISO 11620:2014—Information and documentation—Library performance indicators*. International Organization for Standardization.
- ISO. (2023). *ISO 11620:2023—Information and documentation—Library performance indicators* (pembaruan). International Organization for Standardization.
- ISO. (2014). *ISO 16439:2014—Information and documentation—Methods and procedures for assessing the impact of libraries*. International Organization for Standardization.
- Jamawadi, F. S. (2025). Pro-student governance in academic institutions: Behavior shift from students' expectation versus reality on academic institution services. *Environment and Social Psychology*, 10(2). <https://doi.org/10.59429/esp.v10i2.3273>
- Leskaj, E., Lipi, R., & Gjellaj, Z. (2025). The Impact of Student Participation in University Decision-Making: Insights from the University of Tirana. *Journal of Educational and Social Research*, 15(4), 175–191. <https://doi.org/10.36941/jesr-2025-0130>
- Luescher-Mamashela, T. M. (2013). Student representation in university decision-making: Good reasons, a new lens. *Studies in Higher Education*, 38(10), 1442–1456. <https://doi.org/10.1080/03075079.2011.625496>
- Mandrekar, B. (2021). Delivering Literacy Programmes for the Academic Excellence of the Under Graduate Students. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–11. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104775157&partnerID=40&md5=f39605846074d195f386b39abec8575e>
- Menon, M. E. (2005). Students' views regarding their participation in university governance: Implications for distributed leadership in higher education. *Tertiary Education and Management*, 11(2), 167–182. <https://doi.org/10.1080/13583883.2005.9967145>
- Minksová, L., & Pabian, P. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. *Tertiary Education and Management*, 17, 261–273. <https://doi.org/10.1080/13583883.2011.588722>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi*.
- Prado, J. M. K. do. (2024). Representation of countries in IFLA. *IFLA Journal*, 50(4), 838–850. <https://doi.org/10.1177/03400352241259480>
- Raja, T., Michael, J. L. A., Ramkumar, R., & Anto Michael Suraj, T. (2024). Digital transformation of academic libraries: Developments and encounters. In *AI-Assisted Library Reconstruction* (pp. 307–328). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2782-1.ch017>
- Riva, P., Le Boeuf, P., & Žumer, M. (2017). *The IFLA Library Reference Model, a step toward the Semantic Web*. Makalah, IFLA WLIC 2017. <http://library.ifla.org/1763/1/078-riva-en.pdf>
- Stephen, G. (2021). Usage of ICT resources in academic libraries with special reference to engineering colleges. In *Research Anthology on Collaboration, Digital Services, and*

Resource Management for the Sustainability of Libraries (Vols. 1–2, pp. 945–961).
<https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8051-6.ch052>

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>.

Wilson, S., & McCarthy, G. (2010). The mobile university: From the library to the campus. *Reference Services Review*, 38(2), 214–220.